



COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

***“Blue Innovation”* Pendampingan Tata Kelola Kawasan Maritim Melalui Hilirisasi Produk Unggulan Desa Puger Kulon Guna Sustainability Ekonomi Desa**

Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono ^{1*} | Andriana ² | Hendrawan Santosa Putra ³ | Taufik Kurrohman ⁴ | Pungki Indriatmiko ⁵

^{1*,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

⁵ Program Studi D3 Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Email: reshadiyupm@unej.ac.id.

Funding information

Universitas Jember.

Abstract

Puger Kulon Village demonstrates exceptional potential in the fisheries sector, offering significant opportunities for community economic enhancement. The diversity of fishermen's catches positions the village as a prospective center for sustainable fisheries product downstream processing. Nevertheless, limited human resource awareness regarding downstream processing concepts and insufficient management of fisheries economic zones constitute primary barriers to development. The objective of this community service program is to provide assistance in maritime area governance through downstream processing of superior products to strengthen sustainable village development using blue economy principles. The implementation stages encompass maritime area governance mapping, development of participatory coastal management options involving multiple stakeholders (residents, village government, tourism awareness groups, village-owned enterprises, and private sector), and enhancement of human resource competencies in processed fishery product creation and branding strategies. The anticipated outcome is the establishment of maritime area governance in Puger Kulon Village that effectively utilizes existing potential.

Keywords

Blue Economy; Downstream Processing; Maritime Area Governance; Sustainable Economy.

Abstrak

Desa Puger Kulon menunjukkan potensi luar biasa di sektor perikanan yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi signifikan bagi masyarakat. Keragaman hasil tangkapan nelayan memposisikan desa sebagai calon pusat hilirisasi produk perikanan berkelanjutan. Meskipun demikian, keterbatasan kesadaran sumber daya manusia mengenai konsep hilirisasi dan pengelolaan kawasan ekonomi perikanan yang belum memadai menjadi hambatan utama pengembangan. Tujuan program pengabdian masyarakat adalah memberikan pendampingan tata kelola kawasan maritim melalui hilirisasi produk unggulan untuk memperkuat pengembangan desa berkelanjutan menggunakan prinsip ekonomi biru. Tahapan implementasi mencakup pemetaan tata kelola kawasan maritim, pengembangan opsi pengelolaan pesisir secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (warga, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, badan usaha milik desa, dan sektor swasta), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penciptaan produk olahan perikanan dan strategi branding. Luaran yang diharapkan adalah terbentuknya tata kelola kawasan maritim Desa Puger Kulon yang memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif.

Kata Kunci

Ekonomi Biru; Hilirisasi Produk; Tata Kelola Kawasan Maritim; Ekonomi Berkelanjutan.

1 | PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara maritim di dunia yang memiliki potensi hasil laut yang cukup besar. Sektor kelautan menjadi salah satu sektor penopang bagi perekonomian negara. Sektor ini menyumbang sekitar 2% dari total PDB (Produk Domestik Bruto) dan memiliki laju pertumbuhan PDB sebesar 6,86%, di mana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan PDB sektor lainnya seperti sektor pertambangan, industri manufaktur, konstruksi, dan jasa (Chandra, Rustam, & Safitri, 2021). Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) memproyeksikan potensi hasil ekonomi sektor kelautan pada tahun 2025, khususnya melalui konsep ekonomi biru, mencapai US\$1,33 miliar dan berpotensi menyerap hingga 45 juta lapangan kerja baru, menurut CNBC Indonesia. Industri yang dapat didorong meliputi pengolahan ikan, perkapalan, dan pariwisata bahari (Alaydrus Hadijah & Rachman Arrijal, 2023).

Hasil laut di sini adalah perikanan tangkap yang berbeda dengan perikanan budidaya. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen (Wikipedia, 2024). Salah satu wilayah di Indonesia yang masyarakatnya bergantung dengan sektor kelautan adalah Desa Puger Kulon di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa Puger Kulon terletak di wilayah laut selatan Pulau Jawa yang memiliki potensi hasil laut yang sangat besar, terutama perikanan. Masyarakat di desa ini sebagian besar menggantungkan hidup dengan berprofesi sebagai nelayan. Hampir seluruh kepala rumah tangga di Desa Puger berprofesi sebagai nelayan dan sebagian besar juga diturunkan kepada anak-anaknya.

Pada tahap awal observasi, kondisi desa secara umum tergolong cukup baik. Baik dari segi potensi sumber daya alam maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, belum terdapat lembaga atau mekanisme yang secara khusus menaungi dan mengarahkan upaya diversifikasi produk perikanan, padahal potensi pengembangannya sangat besar. Selama ini hasil tangkapan ikan umumnya langsung dijual dalam bentuk segar di pasar lokal. Apabila penjualan tidak habis, ikan yang tersisa biasanya dibawa pulang oleh nelayan untuk kemudian diolah secara mandiri oleh masing-masing rumah tangga tanpa melalui proses pengolahan yang standar atau bernilai tambah secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang strategis untuk mengembangkan diversifikasi produk perikanan yang lebih inovatif dan berorientasi pasar sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, sektor kelautan menjadi sektor vital bagi masyarakat sekitar.

Dengan perkembangannya di bidang perikanan, Desa Puger Kulon terpilih dalam perlombaan UMKM Nasional tahun 2024 mewakili Kabupaten Jember, sehingga kegiatan hilirisasi produk perikanan perlu diprioritaskan. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, di mana dalam satu tahun hanya terdapat beberapa waktu saja musim ikan berlangsung dan faktor cuaca serta iklim membuat nelayan harus menunda kegiatan melaut untuk beberapa saat, sehingga hal ini tentu memengaruhi pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu adanya hilirisasi produk perikanan dengan konsep *blue economy* guna menciptakan sektor yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Konsep *blue economy* ini merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mata pencaharian melalui pemanfaatan sumber daya laut secara maksimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (Nasution, 2022). Sedangkan menurut *United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)*, ekonomi biru dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan lingkungan (Keliat, *et al.*, 2022). Konsep ini nantinya akan diterapkan dengan cara menentukan pemetaan tata kelola kawasan maritim Desa Puger Kulon sebagai sentral pusat hilirisasi produk hasil perikanan yang melibatkan berbagai *stakeholder* dan warga lokal, kemudian meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan masyarakat tentang penciptaan produk hasil olahan ikan.

Beragam tantangan atas implementasi tata kelola ekonomi biru ini masih dihadapi, berkaitan dengan integrasi lintas sektoral (Sujiwo & Nurlaili, 2024). Temuan Voyer menegaskan agar efektivitas tata kelola ekonomi biru dapat tercapai, harus dilakukan fragmentasi kebijakan dan koordinasi antarsektoral mengingat banyaknya *stakeholder* yang terlibat dan wilayah perairan yang luas (Roem *et al.*, 2025). Masyarakat belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertata dengan baik dalam proses produksi dan bisnis (Putra, Sinaga, & Amir, 2024). Optimalisasi penerapan SOP mampu mendorong peningkatan kinerja SDM dalam tatanan organisasi bisnis meskipun masih sering ditemukan implementasi yang belum maksimal (Bisnis dan Manajemen *et al.*, 2023).

Pada fasilitas wisata maritim yang tersedia, banyak prasarana yang belum lengkap seperti minimnya tanda petunjuk jalur evakuasi, petunjuk lokasi, denah lokasi, dan titik kumpul. Selain itu, belum ada perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi, legalitas produk turunan olahan perikanan masih belum jelas, serta pemasaran produk dan wisata yang masih minim pemanfaatan teknologi digital. Selain ekonomi biru, pengembangan sirkular bisnis di kawasan maritim Desa Puger Kulon juga dapat diterapkan dengan pendekatan *social accounting*. *Social accounting* tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis (Kurniawan & Gitayuda, 2023).

Pendekatan ini dapat diterapkan dalam sektor wisata maritim dengan mengalokasikan sebagian besar

pendapatan dari pengelolaan wisata untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti penyediaan sembako. Dengan sistem ini, *social accounting* mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan *social accounting* yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong partisipasi aktif dalam program-program pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada bisnis maritim (Pedauga, Pardo-Fanjul, Redondo, & Izquierdo, 2020). Dengan diterapkannya konsep tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mampu menciptakan sektor perekonomian yang berkelanjutan sesuai dengan poin yang tertuang dalam SDGs 2030.

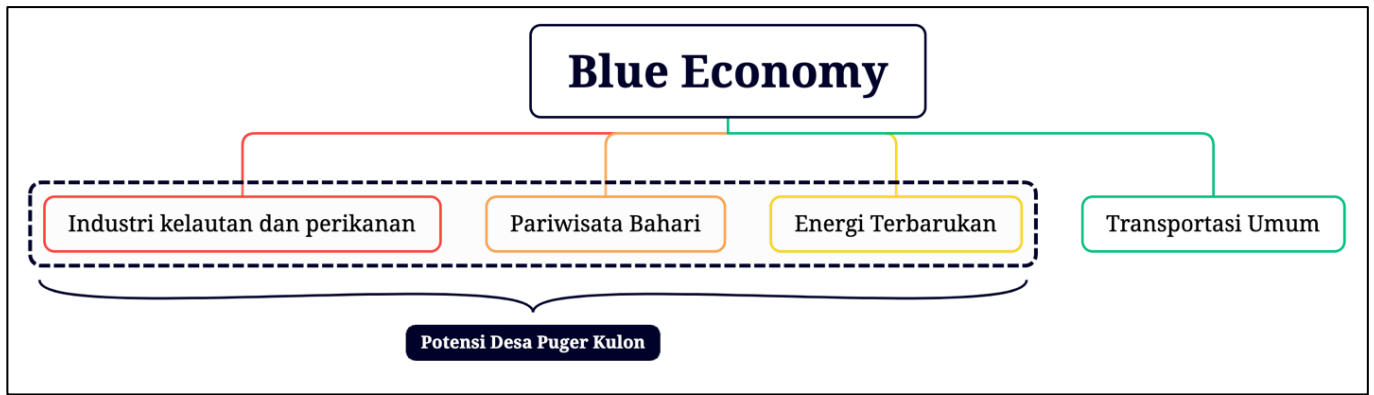
2 | LANDASAN TEORI

Konsep *Blue Economy* pertama kali diperkenalkan pada saat pembangunan berkelanjutan diangkat dan menjadi perhatian di dunia (Yousef, 2023). Pertama kali konsep *Blue Economy* diperkenalkan oleh Gunter Pauli, seorang *entrepreneur* dan *sustainability advocate* dalam bukunya "*The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 million Jobs*" (Yousef, 2023; Smith-Godfrey, 2016). Dalam pembahasan buku tersebut, Pauli memperkenalkan konsep baru tentang ekonomi berbasis penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan ini berawal dari konsep *Green Economy*. Konsep *green economy* merupakan sebuah keseimbangan aktivitas antara aktivitas ekonomi, lingkungan ekologis, dan sumber daya penghidupan dari sebuah komunitas (masyarakat) itu sendiri, hanya saja lebih mengembangkan potensi daratan. Menurut Pauli, laut juga merupakan bagian dari ekosistem lingkungan yang berbeda dengan daratan.

Gunter Pauli menyampaikan model bisnis baru dengan model ekonomi kelautan atau maritim, merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kesehatan ekosistem laut. Konsep ini mencakup berbagai sektor seperti perikanan, budidaya laut (akuakultur), pelayaran, energi laut, pariwisata, hingga bioteknologi kelautan. Potensinya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan telah menarik perhatian para pembuat kebijakan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan (Yousef, 2023). Pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal berpotensi memperkuat keselarasan antara ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai strategi keberlanjutan di daerah pesisir (Adiwena *et al.*, 2025).

Secara teoritis, inovasi merujuk pada penciptaan proses baru, produk baru, atau perbaikan dalam struktur organisasi di dalam suatu industri (Sengupta, 2014). Sengupta menyampaikan bahwa inovasi digunakan untuk menurunkan biaya produksi per unit dan/atau meningkatkan permintaan pasar. Kategori inovasi penting antara lain adalah: 1) inovasi berbasis teknologi, 2) inovasi endogen dan eksogen, 3) inovasi dalam mekanisme seleksi pada perkembangan industri, dan 4) inovasi yang dihasilkan dari kerja sama teknologi (konsorsium). Inovasi berbasis teknologi, seperti: 1) pengembangan produk baru, 2) investasi riset dan pengembangan (*R&D*) dalam sektor industri, serta 3) transfer teknologi melalui peniruan dan penyempurnaan. Inovasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan mendorong batas produksi ke tingkat yang lebih tinggi dan optimal. Dalam konteks Desa Puger Kulon, penulis ingin melakukan beberapa pengembangan melalui *blue economy* dan inovasi sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bappenas melalui dokumen "*Indonesia Blue Economy Roadmap*" menjelaskan dukungan pengembangan sumber daya laut sebagai transformasi ekonomi nasional. *Blue Economy* memainkan peranan strategis dalam membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penetapan tujuan khusus berfokus pada kelautan (SDGs 14) yang mencerminkan semakin besar perhatian global terhadap peran penting laut dalam kebijakan pembangunan. Bagi Indonesia, laut tidak hanya menjadi sumber daya utama, namun juga merupakan pilar utama pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDGs 14 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai target lainnya, seperti pengurangan kemiskinan (SDGs 1), ketahanan pangan (SDGs 2), peningkatan mutu pendidikan (SDGs 4), penyediaan energi bersih dan terjangkau (SDGs 7), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs 8), pembangunan industri dan infrastruktur yang berkelanjutan (SDGs 9), pengurangan kesenjangan (SDGs 10), konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SDGs 12), serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (SDGs 13) (*Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS)*, 2023). Sejalan dengan tujuan tersebut, pengabdian difokuskan terhadap tiga aspek pengembangan dalam *blue economy* dengan mendukung pengembangan industri kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, dan energi baru terbarukan. Secara sistematis seperti yang dijelaskan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1. Konsep Pengembangan *Blue Economy* di Desa Puger Kulon

Secara sederhana, pengembangan dan fokus kegiatan yang difokuskan dalam tiga aspek tersebut adalah tersedianya potensi dari sumber daya yang ada, dan permasalahan yang berkaitan dengan potensi menjadi faktor utama kegiatan tersebut dilakukan. Potensi dan permasalahan yang dimiliki Desa Puger Kulon perlu dilakukan peningkatan dan penanganan secara jangka panjang melalui program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan.

3 | METODE

Aktivitas dan proses penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dokumentasi, dan monitoring lapangan. Alat ukur yang digunakan adalah panduan wawancara, catatan lapangan, notulen FGD, rekaman audio, dan lembar pemetaan. Tahapan dan metode yang terstruktur dan berkelanjutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme desain pengabdian desa binaan Puger Kulon, yakni sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dengan perangkat desa guna pengembangan tata kelola kawasan maritim dengan hilirisasi produk perikanan desa dan penggalian informasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi untuk diatasi agar Desa Puger Kulon mampu menjadi desa mandiri dengan pengembangan hilirisasi produk olahan perikanan.
- 2) Melakukan studi untuk mengidentifikasi potensi lokal sebagai langkah pembuatan tata kelola kawasan maritim Desa Puger Kulon, termasuk sumber daya perikanan, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat serta melakukan pemetaan peluang hilirisasi dengan menilai potensi produk unggulan desa dan peluang hilirisasi hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi desa.
- 3) Pelatihan peningkatan keterampilan dengan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat terkait pengelolaan perikanan dan teknik produksi produk hilir serta pendampingan teknis dengan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha lokal untuk memastikan implementasi praktik-praktik inovatif yang berkelanjutan.
- 4) Produksi produk hilir perikanan dengan melibatkan pelaku usaha lokal serta melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi program, serta mendengarkan umpan balik masyarakat untuk peningkatan berkelanjutan.

Sustainability dari kegiatan program akan terjamin keberlanjutannya. Hal ini didasarkan pada *roadmap* tahunan yang telah dibuat sehingga masyarakat dapat mampu mengacu pada pelaksanaan program sesuai dengan *roadmap* yang tersedia. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kami untuk memastikan keberlanjutan program pengabdian terhadap masyarakat setempat agar pelaksanaannya mampu berjalan secara mandiri yaitu:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
Memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan kepada masyarakat setempat tentang konsep hilirisasi produk perikanan, tata kelola kawasan maritim, pengolahan hasil perikanan, pemasaran produk, dan manajemen bisnis. Pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan ahli, praktisi, atau pihak terkait lainnya.
- 2) Penguatan Organisasi Lokal
Mendukung pembentukan atau penguatan organisasi lokal seperti kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, atau koperasi perikanan. Organisasi ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, serta untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi perikanan di tingkat lokal.
- 3) *Partnership* dengan Pihak Eksternal
Membangun kemitraan dengan pihak eksternal seperti lembaga riset, universitas, organisasi non-pemerintah (NGO), atau perusahaan swasta yang memiliki keahlian dan sumber daya yang dapat mendukung pengembangan ekonomi

perikanan di Desa Puger Kulon. Kemitraan ini dapat memberikan akses tambahan terhadap pengetahuan, teknologi, pasar, dan sumber daya lainnya.

- 4) Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
Memperbaiki atau mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti pelabuhan, pasar ikan, fasilitas pengolahan, dan sarana distribusi. Infrastruktur yang memadai akan mendukung efisiensi dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan.
- 5) Pemasaran dan Promosi
Membantu masyarakat setempat dalam pemasaran dan promosi produk perikanan mereka. Ini dapat dilakukan melalui pendampingan dalam pengembangan strategi pemasaran, pembuatan materi promosi, partisipasi dalam pameran atau festival lokal maupun regional, dan pemanfaatan platform *online* untuk meningkatkan jangkauan pasar.
- 6) Monitoring dan Evaluasi
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres dan dampak dari program yang akan dilaksanakan. Dengan memantau secara teratur, dapat diidentifikasi perubahan yang diperlukan dan kesempatan untuk perbaikan. Selain itu, evaluasi dilakukan dengan survei lanjutan dan analisis data terkait perubahan pendapatan, kapasitas produksi, dan tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah program dilaksanakan.
- 7) Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda
Memberdayakan perempuan dan pemuda dalam kegiatan ekonomi perikanan. Mereka seringkali merupakan bagian yang penting dalam rantai nilai perikanan dan memiliki potensi besar untuk berperan dalam pengembangan ekonomi lokal.

Dalam pelaksanaan program, perlu adanya kunci untuk menentukan keberhasilan program yang direncanakan melalui indikator pencapaian sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Capaian Keberhasilan Kegiatan

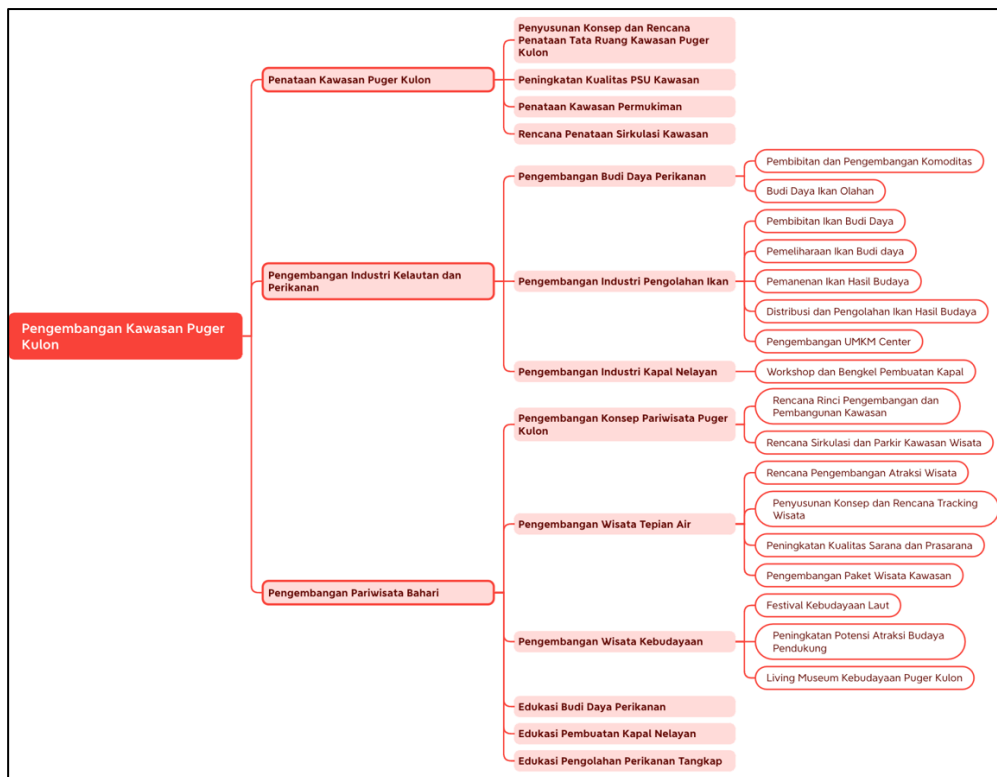
No.	Program	Indikator Capaian
1.	Tata kelola kawasan maritim Desa Puger Kulon melalui <i>masterplan</i> desa dan maket kawasan	Terlaksananya infrastruktur sesuai dengan <i>masterplan</i> desa, seperti fasilitas penangkapan ikan, pusat pengolahan hasil perikanan, dan wisata perikanan
2.	Produk Asli Desa Puger Kulon berupa turunan hasil olahan perikanan	Terdapatnya diferensiasi produk olahan perikanan yang sangat beragam dan dapat dijual dengan <i>value</i> yang lebih tinggi
3.	Peningkatan kompetensi mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi	Adanya peningkatan wawasan dan <i>soft skill</i> dalam <i>problem solving</i> dari permasalahan mitra
4.	Modul mengenai tata kelola kawasan maritim Desa Puger Kulon	Adanya modul tata kelola kawasan maritim di Desa Puger Kulon

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil pengabdian yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di Kawasan Desa Puger Kulon adalah dengan melakukan beberapa kegiatan dan program diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pertama adalah belum adanya pemetaan tata kelola kawasan maritim di desa tersebut. Untuk mengatasi hal ini, direncanakan survei partisipatif yang melibatkan warga, pemetaan potensi unggulan desa, serta identifikasi potensi sumber daya laut dan potensi konflik. Target dari solusi ini adalah tersedianya peta tata kelola kawasan maritim dalam bentuk *masterplan* dan maket Desa Puger Kulon sebagai fasilitas infrastruktur desa. Berdasarkan hasil yang didapatkan, tim pengabdian merumuskan konsep pengembangan tata kelola yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi melalui beberapa sektor diantaranya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Konsep Pengembangan Tata Kelola Kawasan Puger untuk mendukung *Blue Economy*

Gambar 2 merupakan peta pikiran yang menggambarkan rencana strategis Pengembangan Kawasan Puger Kulon melalui pendekatan multidimensi untuk mendukung pengembangan tatakelola kawasan maritim yang lebih optimal di kawasan Desa Puger Kulon. Pengembangan kawasan ini terbagi ke dalam tiga pilar utama, yaitu: penataan kawasan, pengembangan industri kelautan dan perikanan, serta pengembangan pariwisata bahari. Pada aspek penataan kawasan, fokus diarahkan pada perencanaan tata ruang dan penataan infrastruktur, seperti penyusunan konsep ruang kawasan, peningkatan kualitas prasarana dan utilitas umum (PSU), penataan permukiman, hingga pengaturan sirkulasi kawasan untuk mendukung mobilitas yang efisien. Penataan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang tertata rapi, fungsional, dan mendukung pembangunan sektor lainnya. Sementara itu, pengembangan industri kelautan dan perikanan mencakup tiga sub-sektor utama: budi daya perikanan, industri pengolahan ikan, dan industri kapal nelayan. Budi daya perikanan difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan melalui kegiatan pembibitan, pemeliharaan, hingga panen. Industri pengolahan ikan mencakup distribusi hasil budidaya serta pembentukan UMKM Center sebagai wadah pemberdayaan ekonomi lokal. Pengembangan industri kapal nelayan didukung melalui pendirian workshop dan bengkel pembuatan kapal guna meningkatkan kapasitas produksi dan keterampilan masyarakat. Pada pilar terakhir, pengembangan pariwisata bahari diarahkan untuk menjadikan Puger Kulon sebagai destinasi wisata berbasis kelautan dan budaya. Ini meliputi penyusunan konsep dan rencana pembangunan wisata, pengembangan atraksi dan tracking wisata, penataan kawasan wisata tepian air, serta penyelenggaraan festival budaya laut. Tak hanya itu, aspek kebudayaan juga diperkuat melalui pengembangan wisata berbasis budaya lokal dan pembangunan Living Museum sebagai pusat pelestarian dan edukasi budaya Puger Kulon. Selain itu, terdapat pula program edukasi masyarakat yang mencakup pelatihan budi daya perikanan, pembuatan kapal, dan pengelolaan perikanan tangkap untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia setempat. Secara keseluruhan, rencana pengembangan ini menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu antara perencanaan ruang, penguatan sektor ekonomi maritim, dan pengembangan potensi wisata lokal dengan tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

- 2) Permasalahan kedua berkaitan dengan belum terwujudnya hilirisasi produk perikanan dan masih sedikitnya UMKM pengolah ikan yang bersertifikasi. Solusinya adalah menciptakan tata kelola kawasan pengolahan serta memberikan pelatihan pengolahan ikan menjadi produk turunan yang memiliki potensi besar untuk memaksimalkan sektor perikanan unggulan. Program pelatihan dan sosialisasi ekonomi biru kepada pelaku UMKM di kawasan pesisir membekali mereka dengan keterampilan berwirausaha secara berkelanjutan memperkuat daya saing dan konservasi sumber daya laut (Kusnindar *et al.*, 2025). Target luaran dari solusi ini adalah peningkatan softskill masyarakat desa dalam mengolah produk perikanan unggulan menjadi produk turunan bernilai tambah (*value added*). Untuk

mendukung konsep pengembangan yang sudah dilakukan ditahap pertama, langkah selanjutnya adalah proses peningkatan nilai ekonomi melalui pembuatan produk pendukung dari sektor utama. Kegiatan ini secara rinci dilakukan melalui pelatihan dan workshop pembuatan Kaldu oalahan dan bakso ikan dari hasil perikanan tangkap ikan lemuru. Workshop pengolahan ikan hasil perikanan tangkap dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan untuk menambahkan nilai pendapatan ekonomi. Sebelum dilakukan kegiatan pelatihan, Tim bersama mahasiswa melakukan uji coba dan praktik di dalam laboratorium untuk menguji dan memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan alih ilmu dapat dilakukan.



Gambar 3. Proses Produksi di Laboratorium



Gambar 4. Workshop Pembuatan Kaldu Ikan dan Bakso Ikan Lemuru

Proses ini dimaksudkan untuk meningkatkan ide dan kreatifitas dari ibu-ibu yang mayoritas suami merupakan seorang nelayan. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu mendorong masyarakat terutama perempuan dan ibu rumah tangga untuk produktif bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis dari rumah tanpa bergantung pada sumber pendapatan suami ketika, produksi perikanan tangkap tidak optimal di bulan-bulan tertentu dalam satu tahun. Produk ini diharapkan menjadi subsutusi ekonomi ditingkat rumah tangga sebagai pendukung program tujuan Pembangunan Berkelanjutan di sektor maritim. Peningkatan Pendapatan bergantung pada musim ikan yang terjadi sehingga saat stok ikan melimpah dan kondisi cuaca mendukung penangkapan hasil tangkapan akan meningkat secara signifikan yang secara langsung berkorelasi dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, saat memasuki musim paceklik atau cuaca buruk ketersediaan ikan menurut drastis menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan berimbas langsung pada pendapatan nelayan.

- 3) Permasalahan ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prospek pengembangan sektor unggulan desa. Untuk itu, solusinya adalah edukasi melalui pemberdayaan dan pelatihan, khususnya terkait pengolahan komoditas perikanan agar bisa menjadi potensi unggulan desa. Target luaran yang diharapkan adalah terciptanya

produk turunan perikanan yang beragam sebagai upaya peningkatan ekonomi Desa Puger Kulon dengan *value added* yang tinggi. Permasalahan ini diselesaikan dengan pendekatan diskusi dan FGD yang dilaksanakan dengan mengundang Ahli Perencanaan Kawasan Wisata. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa pengembangan kawasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat harus dimulai dan dibangun dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat juga menyadari bahwa permasalahan lingkungan yang ada saat ini menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan. Bentuk pengembangan tidak harus berupa pariwisata atau pengembangan yang besar dalam kurun waktu yang pendek.



Gambar 5. *Forum Group Discussion* (FGD) Perencanaan Desa dan Menggali Kembali Potensi dan Permasalahan Desa

Perubahan dimulai dari pengelolaan dan pengolahan sumber daya yang dimiliki dengan peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat menjadi mandiri dan mampu mengembangkan sesuai dengan rencana pengembangan yang dilakukan. Forum diskusi yang dilakukan juga menjadi bagian dari identifikasi awal dan diskusi terbuka untuk bersama-sama menggali kembali potensi yang bisa dikembangkan dan permasalahan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Proses ini juga digunakan sebagai persamaan persepsi terkait dengan rencana pengembangan dan perbaikan tata kelola yang perlu dilakukan, tidak hanya keinginan saja, namun juga kebutuhan mendasar yang paling penting dan mendesak untuk segera dilakukan penanganan. Pada tahap implementasi program terdapat beberapa tantangan utama berupa perbedaan mindset SDM akibat keragaman kultur yang mempengaruhi penerimaan inovasi, keterbatasan kemampuan teknologi yang menghambat adopsi metode baru, minimnya kepemilikan dan penggunaan *smartphone* sehingga membatasi pemanfaatan teknologi digital, dan perlunya penguatan kualitas program yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Beberapa tantangan tersebut memerlukan strategi adaptif dan partisipatif untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

4.2 Pembahasan

Kegiatan pengabdian di Desa Puger Kulon menunjukkan implementasi teori tangga partisipasi masyarakat yang cukup baik, namun masih berada pada tingkat menengah dalam spektrum partisipasi. Berdasarkan analisis kegiatan yang dilakukan, partisipasi masyarakat telah mencapai tingkat konsultasi dan kemitraan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek program tetapi juga terlibat aktif dalam proses perencanaan dan implementasi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai *stakeholder*, survei partisipatif untuk pemetaan potensi desa, dan *workshop* pengolahan ikan yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai pelaku utama.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi dari segi kedalaman partisipasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih menunjukkan pola di mana tim pengabdian berperan sebagai inisiator dan fasilitator utama, sementara masyarakat lebih berperan sebagai partisipan yang responsif terhadap program yang dirancang. Meskipun ada keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi dan pelatihan, belum terlihat jelas sejauh mana masyarakat memiliki kontrol dan kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan kawasan maritim mereka. Aspek keberlanjutan program juga menjadi pertanyaan penting, karena belum ada mekanisme yang jelas untuk memastikan program dapat berlanjut secara mandiri setelah tim pengabdian menyelesaikan tugasnya.

Untuk meningkatkan kualitas partisipasi, kegiatan ini perlu berevolusi menuju tingkat yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi, yaitu *delegated power* dan *citizen control*. Ini berarti masyarakat perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola program pengembangan, termasuk dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Penguatan kapasitas institusi lokal seperti BUMDes dan *pokdarwis* menjadi kunci penting, tidak hanya sebagai pelaksana program tetapi sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, di mana masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Aspek keberlanjutan program juga menjadi catatan penting. Belum terdapat mekanisme yang mapan untuk menjamin kelangsungan program setelah intervensi program selesai. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengalihkan kepemilikan program secara bertahap kepada institusi lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan seperti BUMDes dan *Pokdarwis* menjadi krusial, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor pengambil kebijakan tingkat desa. Kedua lembaga ini merupakan entitas yang memiliki legitimasi formal, jaringan sosial, dan akses langsung terhadap sumber daya yang tersedia di desa, seperti aset produksi, infrastruktur, serta relasi dengan pelaku usaha dan pemerintah desa. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan peran strategis mereka, program pengembangan kawasan maritim

dan hilirisasi produk perikanan akan lebih berpeluang untuk berlanjut secara mandiri, karena dikelola oleh institusi yang memiliki kontrol atas sumber daya lokal dan kedekatan langsung dengan masyarakat sasaran.

Untuk mendorong keberlanjutan hasil program, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor antara BUMDes, *Pokdarwis*, tim pengabdian, dan masyarakat desa. Sinergi dari beberapa pihak ini diharapkan mampu mengintegrasikan potensi sumber daya desa, pengelolaan wisata, serta pendampingan teknis dan akademis secara terpadu. Bentuk penguatan yang direkomendasikan meliputi penyusunan *master plan* pengembangan desa pesisir sebagai panduan strategis jangka panjang serta pengembangan produk perikanan bernilai tambah yang dapat memperluas peluang pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui koordinasi yang lebih erat, pembagian peran yang jelas, dan *forum* komunikasi rutin, diharapkan kolaborasi ini mampu memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, mendorong inovasi produk, dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Pengembangan menuju partisipasi yang lebih tinggi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun kapasitas masyarakat, tidak hanya dari segi teknis tetapi juga manajerial dan kepemimpinan. Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan untuk mengelola program secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran produk, dan pengembangan jaringan kemitraan. Implementasi prinsip *co-management* yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam pengelolaan bersama dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan *sustainability* program. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi berkembang menjadi proses pemberdayaan yang sesungguhnya di mana masyarakat menjadi agen perubahan bagi pembangunan desa mereka sendiri.

Program yang dilaksanakan di Desa Puger Kulon menunjukkan korelasi yang cukup baik dengan berbagai metode pemberdayaan masyarakat yang telah mapan dalam teori pembangunan komunitas. Pendekatan yang digunakan memiliki kesesuaian dengan metode *Community-Based Development* (CBD), di mana program dibangun berdasarkan identifikasi potensi dan kebutuhan lokal melalui survei partisipatif dan FGD. Hal ini sejalan dengan prinsip CBD yang menekankan bahwa pembangunan harus berakar dari bawah (*bottom-up approach*) dan memanfaatkan aset-aset yang sudah ada di masyarakat, seperti potensi perikanan dan kearifan lokal yang dimiliki nelayan Puger Kulon.

Korelasi yang kuat juga terlihat dengan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD), di mana program tidak dimulai dari identifikasi masalah atau kekurangan, tetapi dari pemetaan aset dan potensi yang dimiliki desa. Kegiatan pemetaan potensi unggulan desa, identifikasi sumber daya laut, dan pengembangan produk turunan perikanan menunjukkan penerapan prinsip ABCD yang fokus pada kekuatan internal komunitas. *Workshop* pengolahan ikan yang diikuti 25 peserta dengan melibatkan ibu-ibu nelayan juga mencerminkan pemanfaatan aset manusia yang sudah ada, yaitu pengetahuan tradisional tentang pengolahan hasil laut yang kemudian dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, program perlu mengintegrasikan lebih banyak elemen dari metode *Participatory Action Research* (PAR), di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian tetapi juga sebagai *co-researcher* yang terlibat dalam seluruh siklus penelitian-aksi-refleksi.

5 | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian di Desa Puger Kulon telah menunjukkan implementasi pemberdayaan masyarakat yang berada pada level menengah dalam spektrum partisipasi, dengan pencapaian yang baik pada tingkat konsultasi dan kemitraan sesuai teori tangga partisipasi Arnstein. Program berhasil mengintegrasikan pendekatan *Community-Based Development* dan *Asset-Based Community Development* melalui pemetaan potensi desa, *workshop* pengolahan ikan, dan pelibatan *multi-stakeholder* dalam *Focus Group Discussion*. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam hal pemberian kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengontrol proses pembangunan, serta belum optimalnya implementasi metode pemberdayaan yang lebih transformatif seperti *Popular Education* dan *Participatory Action Research*. Korelasi antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai metode pemberdayaan menunjukkan kesesuaian yang baik dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis komunitas, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek pembelajaran kritis, refleksi kolektif, dan keberlanjutan program. Pendekatan yang digunakan efektif dalam transfer pengetahuan teknis dan mobilisasi sumber daya lokal, namun belum sepenuhnya menciptakan transformasi struktural yang memungkinkan masyarakat menjadi agen perubahan yang mandiri dan berkelanjutan. Secara harfiah, model intervensi yang dikembangkan dalam program ini dapat diadaptasi pada konteks wilayah pesisir lain, sepanjang dilakukan kajian mendalam mengenai keterkaitan antara isu-isu spesifik di lokasi sasaran dengan pendekatan penyelesaian yang telah terbukti efektif.

Program pemberdayaan di Desa Puger Kulon perlu ditingkatkan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola program mereka sendiri. Masyarakat tidak hanya menjadi peserta *workshop* atau diskusi, tetapi harus diberikan kontrol penuh untuk membuat keputusan penting tentang pengembangan desa mereka. BUMDes dan *pokdarwis* perlu diperkuat sebagai lembaga utama yang memiliki otoritas mengelola program dan dana secara mandiri, dengan pendampingan yang bertahap sampai mereka benar-benar mandiri. Metode pemberdayaan yang digunakan perlu diperluas dari sekadar pelatihan teknis menjadi proses pembelajaran yang lebih mendalam. Masyarakat

harus dilibatkan sebagai peneliti yang menganalisis masalah dan mencari solusi mereka sendiri, bukan hanya menerima program yang sudah dirancang dari luar. Pendekatan ini akan membuat masyarakat lebih memahami akar permasalahan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Penelitian ini membuka peluang bagi riset lanjutan yang berfokus pada pemanfaatan potensi kawasan maritim di Desa Puger, khususnya dalam pengembangan pariwisata bahari. Kajian mendalam mengenai strategi pengelolaan destinasi wisata serta sistem manajemen keuangan yang efektif diperlukan guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut secara berkelanjutan. Keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan. Program tidak boleh berhenti ketika tim pengabdian selesai, tetapi harus memiliki mekanisme untuk terus berjalan secara mandiri. Pengembangan usaha sosial yang menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat sosial dapat menjadi solusi, seperti *UMKM Center* yang tidak hanya fokus pada *profit* tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Sistem monitoring dan evaluasi harus dikelola oleh masyarakat sendiri dengan indikator yang mereka tentukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka. Untuk mendorong keberlanjutan dan perluasan dampak program, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu saran utama adalah pentingnya menyusun rencana pengembangan program secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah desa, BUMDes, kelompok UMKM, serta lembaga pendidikan tinggi. Sebagai rekomendasi, Tim Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) menjadi rekomendasi lintas sektor yang dapat merencanakan tata ruang yang dibutuhkan pada sektor pariwisata bahari sebagai pengabdian lanjutan. Selain itu, perlu dilakukan advokasi kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember, untuk mendukung program hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Advokasi ini dapat diarahkan pada penyusunan regulasi atau peraturan desa (*Perdes*) tentang tata kelola kawasan maritim dan penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan UMKM hasil laut secara berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak dan responsif, maka program serupa dapat direplikasi dan dikembangkan lebih luas di wilayah pesisir lainnya. Yang paling penting adalah mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis tentang kondisi mereka. Masyarakat perlu diajak untuk tidak hanya menerima keadaan yang ada, tetapi juga memahami mengapa masalah terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Setiap kegiatan harus disertai dengan refleksi bersama untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki strategi ke depan. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan akan menciptakan perubahan yang benar-benar berkelanjutan dan transformatif bagi masyarakat Desa Puger Kulon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan tak ternilai bagi keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat "*BLUE INNOVATION*" yang berfokus pada pendampingan tata kelola kawasan maritim melalui hilirisasi produk unggulan di Desa Puger Kulon untuk keberlanjutan ekonomi desa. Ucapan terima kasih pertama dan utama kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan pendanaan dan kebijakan yang memungkinkan terwujudnya inisiatif pemberdayaan masyarakat ini. Komitmen kementerian dalam memajukan program penelitian dan pengembangan berbasis masyarakat telah menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi keterlibatan yang bermakna antara institusi akademik dan komunitas pedesaan. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Universitas Jember, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), atas dukungan institusional, fasilitas, dan bantuan administratif selama pelaksanaan program. Dedikasi universitas terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi secara bermakna dalam pembangunan masyarakat. Apresiasi khusus kami sampaikan kepada fasilitas laboratorium yang mendukung tahap pengembangan dan pengujian produk, serta infrastruktur akademik yang memfasilitasi transfer pengetahuan dan kegiatan peningkatan kapasitas.

Penghargaan tulus kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Puger Kulon, termasuk Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, yang telah menunjukkan kerja sama luar biasa dan komitmen terhadap keberhasilan program. Partisipasi aktif mereka dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat, memberikan wawasan lokal, dan mendukung koordinasi logistik sangat penting untuk implementasi yang efektif dari semua kegiatan. Keterbukaan pemerintah desa terhadap inovasi dan tata kelola kolaboratif telah menjadi landasan pencapaian program dalam pengembangan kawasan maritim dan hilirisasi produk perikanan. Kami mengakui dengan rasa syukur kontribusi berharga dari seluruh narasumber *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk ahli perencanaan kawasan pesisir, spesialis pengembangan perikanan, dan praktisi pembangunan masyarakat yang dengan murah hati berbagi keahlian dan wawasan mereka. Bimbingan profesional dan rekomendasi teknis mereka secara signifikan meningkatkan kualitas desain program dan strategi implementasi. Pertukaran pengetahuan kolaboratif yang difasilitasi melalui konsultasi ahli ini telah memperkaya fondasi teoritis dan aplikasi praktis program. Kami menyampaikan apresiasi tulus kepada seluruh pemangku kepentingan yang aktif berpartisipasi dalam inisiatif pengabdian masyarakat ini, termasuk anggota masyarakat, kelompok perempuan, asosiasi

nelayan, kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan mitra sektor swasta. Partisipasi antusias mereka, umpan balik konstruktif, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan telah menjadi kekuatan pendorong di balik keberhasilan program. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada masyarakat lokal, terutama keluarga nelayan dan perempuan wirausaha yang merangkul peluang peningkatan kapasitas dan menunjukkan dedikasi luar biasa untuk mentransformasi praktik tradisional mereka menjadi kegiatan ekonomi bernilai tambah. Semangat kolaboratif dan pembelajaran bersama yang menjadi ciri kemitraan ini mencerminkan esensi sejati pembangunan berbasis masyarakat dan memberikan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan jangka panjang inisiatif *Blue Innovation* di Desa Puger Kulon.

REFERENSI

- Adiweni, M., Santoso, H., Nurhafida, A., Jaya, A., & Kunci Ekonomi biru Ekonomi hijau Pertanian lahan sempit, K. (2025). Optimalisasi sumber daya perikanan dalam mendukung keselarasan blue dan green economy di Tarakan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(Suppl1), 259–268. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10iSuppl1.8451>
- Alaydrus, H., & Rachman, A. (2023, May 29). RI punya kunci baru! Ekonomi bisa meroket & gegerkan dunia. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529084136-4-441316/ri-punya-kunci-baru-ekonomi-bisa-meroket-gegerkan-dunia>
- Chandra, Y. A., Rustam, I., & Safitri, P. (2021). Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 1-19. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.27>
- Keliat, M., Sugianto, D. N., Yonviner, Damanik, R., Noor, R., Lestari, I., & Farizal, F. (2022). *Prospek ekonomi biru bagi pemulihan ekonomi Indonesia*. Laboratorium Indonesia 2045.
- Kurniawan, M. Z., & Gitayuda, M. B. S. (2023). Tingkatkan Inklusi Keuangan UMKM di Wisata Pesisir Madura: Peran Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Fintech. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 80-87. <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i1.4900>
- Kusnandar, A. A., Khoiriyah, S., Pasya, D. J., & Dwi, B. (2025). Kebijakan ekonomi biru dan keberlanjutan UMKM di kawasan pesisir. *Abdimas Indonesian Journal*, 5(1), 489–496. <https://doi.org/10.59525/aj.v5i1.703>
- Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS). (2023). *Indonesia blue economy roadmap*. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS).
- Nasution, M. (2022). Potensi dan tantangan blue economy dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia: kajian literatur. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 340–364.
- Pedauga, L. E., Pardo-Fanjul, A., Redondo, J. C., & Izquierdo, J. M. (2020). Assessing the economic contribution of sports tourism event: A regional social accounting matrix analysis approach. *Tourism Economics*.
- Putra, A. G. B. S., Sinaga, F., & Amir, F. L. (2024). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Bar. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 3(8), 1240-1252. <https://doi.org/10.22334/paris.v3i8.841>
- Qur'Aini, P. W., Rohayati, R., & Fitriani, F. (2023). Optimalisasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) guna meningkatkan kinerja SDM pada PT Cakra Perkasa Jaya Mulia Banjarmasin. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 37–43. <https://ejournal.poliban.ac.id/index.php/JBM/article/view/1957>
- Roem, M., Ibrahim, M. A., Nara, N., Abdullah, M. T., & Iskandar, D. (2025). Strategy of implementing blue economy policy in developing marine tourism. *Journal La Bisecoman*, 6(1), 17–24. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v6i1.1943>

- Sengupta, J. (2013). Endogenous Innovation. In *Theory of Innovation: A New Paradigm of Growth* (pp. 79-98). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02183-6_4
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime affairs: Journal of the national maritime foundation of India*, 12(1), 58-64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>.
- Sujiwo, A. S., & Nurlaili, N. (2024). Pengembangan tata kelola ekonomi biru untuk memperkuat blue economy development index di Indonesia. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 13(1), 67. <https://doi.org/10.33512/jpk.v13i1.23726>
- Wikipedia. (2024, October 15). Perikanan tangkap. *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan_tangkap
- Yousef, M. (2023). Blue economy literature. *International Journal of Business and Management*, 12-18.

How to cite this article: Mulyono, R. D. A. P., Andriana, A., Putra, H. S., Kurrohman, T., & Indriatmiko, P. (2025). "Blue Innovation" Pendampingan tata Kelola Kawasan Maritim Melalui Hilirisasi Produk Unggulan Desa Puger Kulon Guna Sustainability Ekonomi Desa. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 394-405. <https://doi.org/10.59431/ajad.v5i2.592>.